Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

Analisis Tipologi dan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bontang

(Studi Kasus Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Guntung)

Bia Musa[1], Muhammad Lukman Hakim[2]
[1] Badan Penelitian dan Pengabdian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
[2]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Badan Penelitian dan Pengabdian, Universitas Brawijaya
[1]bia.musa@yahoo.com

Abstract

The city bontang is a city in east kalimantan commonly used as a groove, shipping good grooves, private shipping the people and national shipping. groovesThis study attempts to analyze the condition of urban village bontang, kelurahan-kelurahan coastal cities researchers to 3 villages namely, bontang, kuala urban village tanjung sea beautiful and guntung. urban villageIn preparing tipologi-tipologi coastal villages are based on aspects of economic and buday, sosisl and draw up strategic langkah-langkah. area developmentMethods used in this research is a qualitative methodology.Data collection techniques in research is observation and interview.The research results show that typologies and development urban village urban village coastal city bontang on 2016 and 2017 of each of the kelurahan was as follows: urban village bontang kuala decreased as much as two points , and judgment the field of regional and sociological urban village bontang kuala has not changed any .Urban village guntung decreased by one points , assessment the field of regional guntung urban village has not changed any and judgment the field of kemasayarakatan urban village guntung decreased as much as two points .Tanjung the sea beautiful on 2016 to 2017 increased as many as 13 points . While a strategy that was done to the development of urban village in the region coastal cities bontang covering 4 stretagi, among them are: 1) optimization of fisheries production through the cultivation of fisheries products, ; 2) the optimization of the role of fish market and personnel to the marketing of the sea; 3) strengthening community facilities and infrastructure to fishermen; and 4) strengthening efforts to conservation and rehabilitation. coastal ecologicalAll four of the strategy has been done by masing-masing, village namely bontang, kuala guntung and tanjung sea beautiful with very good.

Keywords: *Typology, Development, Strategy*

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

Abstrak

Kota Bontang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur yang biasa digunakan sebagai alur pelayaran, baik alur pelayaran swasta, rakyat maupun alur pelayaran nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kelurahan kelurahan-kelurahan pesisir Kota Bontang, peneliti mengambil 3 kelurahan yaitu, kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Guntung. Dalam menyusun tipologi-tipologi desa pesisir berdasarkan aspek sosisl ekonomi dan buday, serta menyusun langkah-langkah strategis pengembangan wilayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi dan wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipologi dan pengembangan kelurahan – kelurahan pesisir Kota Bontang pada tahun 2016 dan 2017 dari masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut: Kelurahan Bontang Kuala mengalami penurunan sebanyak 2 poin, dan penilaian bidang kewilayahan dan kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala tidak mengalami perubahan apapun. Kelurahan Guntung mengalami penurunan sebanyak 1 poin, penilaian bidang kewilayahan Kelurahan Guntung tidak mengalami perubahan apapun dan penilaian bidang kemasayarakatan Kelurahan Guntung mengalami penurunan sebanyak 2 poin. Kelurahan Tanjung Laut Indah pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan sebanyak 13 poin.Sedangkan Strategi yang dilakukan untuk pengembangan kelurahan di kawasan pesisir Kota Bontang meliputi 4 stretagi, diantaranya adalah: 1) optimalisasi produksi perikanan melalui budidaya komoditas perikanan,; 2) optimalisasi peran TPI dan PPI untuk pemasaran hasil laut masyarakat; 3) penguatan sarana dan prasarana bagi nelayan; dan 4) penguatan upaya konservasi dan rehabilitasi ekologis pesisir. Keempat strategi tersebut telah dilakukan oleh masing-masing desa, yaitu Bontang Kuala, Guntung dan Tanjung Laut Indah dengan sangat baik.

Kata Kunci: *Strategi, Pengembangan, Tipologi*

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

PENDAHULUAN

Kota Bontang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya, Bontang merupakan kota administratif di wilayah Kabupaten Kutai. Kota Bontang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur,Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang.

Secara geografis, Kota Bontang memiliki wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur dan memiliki jumlah penduduk yang sedikit dibanding dengan daerah lain di wilayah propinsi Kalimantan Timur. Kepadatan penduduk Kota Bontang masih rendah, meski laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2016 adalah sebesar 166.868 jiwa, jumlah ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2015 yang diperkirakan sekitar 163.326 jiwa atau naik dengan laju pertumbuhan sekitar 2,17 persen. Secara administrasi, Kota Bontang terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 wilayah pesisir. Dari tiga kecamatan yang memiliki penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yaitu ada dua kecamatan Bontang Utara dan Bontang selatan. Dari dua kecamatan itu penulis mengambil tiga kelurahan yang menjadi objek penelitian, dari Kecamatan Bontang Utara mengambil dua kelurahan yaitu Kelurahan Guntung dan kelurahan yang paling Timur yaitu Kelurahaan Bontang Kuala. Dari Kecamatan Bontang Selatan peneliti mengambil satu kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Laut Indah. Peneliti memilih tiga wilayah tersebut karena ketiga kelurahan tersebut memiliki keunikan yang berbeda tetapi rata-rata mata pencaharian mereka hampir sama yaitu memanfaatkan wilayah pesisir dan yang menjadi nelayan, tambak dan lain-lain. Dari ketiga wilayah tersebut juga tergolong wilayah yang masyarakatnya terhitung masih banyak yang tergolong daerah miskin. Sebab dari itu peneliti memilih tiga wilayah tersebut.

Dalam permasalahan yang diambil oleh penulis dimana wilayah pesisir Kota Bontang memiliki beberapa masalah masyarakat masih ada yang tidak mempunyai pendidikan, kurangnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, burukya pengelolaan hasil laut, minimnya akses prasarana umum, jauh dari kesejahteraan dan masih kurangnya prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di wilayah pesisir.

Dari banyaknya masalah yang terjadi pemerintah mengeluarkan program IDM. Melalui IDM dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 81 Tahun 2015 adanya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ada beberapa evaluasi yang akan menjadi indikator penilian yaitu: Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang Kemasyarakatan. Adapun klasifikasi kelurahan daam 3 status yakni: (i) Cepat Berkembang, (ii) Berkembang; dan (iii) Kurang Berkembang. Tujuan untuk menentukan status desa tersebut untk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

kebijakan yang diperlukan. Permasalahan jika dilihat dari IDM maka ada 3 indikator yang dapat dilihat Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Kewilayahan.

Dalam penelitian ini untuk menentukan tipologi wilayah pesisir peneliti megelompokan tipologi wilayah berdasarkan 3 status desa yaitu : (i) Cepat Berkembang, (ii) Berkembang; dan (iii) Kurang Berkembang memlalui berapa indikator dari tiap-tiap status desa tersebut. Tipologi yang dimaksud adalah pengelompokan berdasarkan tpe atau jenis dari 3 status desa ke dalam wilayah pesisir Kota Bontang. Untuk menentukan wilayah adapun beberapa indikator, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, Permukiman, Ekonomi, dan Pemerintahan.

Langkah awal dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir Kota Bontang secara berkelanjutan adalah dengan menyusun tipologi-tipologi desa pesisir berdasarkan aspek sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan aspek tersebut akan dihasilkan tipologi desa dilihat dari tingkat perkembangannya. Tingkat perkembangan desa merupakan suatu keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduk desa yang berangkutan dalam menyelengarakan kehidupannya serta mengelola sumberdaya. Berdasarkan tingkat perkembangan desa dapat ditentukan usaha-usaha untuk meningkatkan desa tradisional menjadi desa transisi. Tingkat perkembangan desa ini berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat karena tingkat kesejahteraan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan potensi dan mengelola wilayah dengan baik.

Lebih lanjut dalam lingkungan pembangunan perdesaan akan dinilai apakan kemajuan pembangunan yang dialami di bidang ekonomi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan secara meyeluruh, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi potensi dan masalah yang dimiliki desa-desa wilayah pesisir pada masing-masing tipologi. Peyusunan tipologi bermaksud untuk mengelompokkan desa-desa pesisir berdasarkan karakter tertentu sehingga memudahkan dalam peyusunan perkrembangannya sesuai dengan karekteristik, potensi, dan masalah masing-masing tipologi.

Rumusan masalah :

1. Bagaimana tipologi dan pengembangan kelurahan-kelurahan pesisir Kota Bontang?
2. Bagaimana strategi pembangunan wilayah kelurahan-kelurahan pesisir?

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan pada dasarnya identik dengn perubahan yang terjadi pada suatu wilayah, termasuk di dalamnya pembangunan yang berlangsung di desa. Pembangunan tidak terlepas dari perubahan fisik yang terjadi, seperti halnya pembangunan infrastruktur yang terlihat paling meninjol diantara contoh-contoh pembangunan lain. Adanya pembangunan seakan berdampak pada beberapa sektor lain, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan pembangunan mempunyai andil dan dampak besar terhadap kemajuan dan keberlangsungan perekonomian masyarakat.

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

Pembangunan muncul sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun masyarakat itu sendiri. Pembangunan mempunyai cakupan yang luas, ada beberapa bidang dalam pembangunan, antara lain sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sarana dan Prasarana, Politik, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Aparatur, Wilayah dan Tata Ruang serta Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, 2011). Beberapa bidang yang berorientasi pada pembangunan ini saling berkaitan dan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Pembangunan menurut etimologinya berasal dari kata bangun yang berarti adar atau siuman, bangkit atau berdiri yaitu suatu usaha membuat keadaan menjadi lebih baik atau membuat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia menjadi lebih baik (Suprih dkk, 2008). Sedangkan menurut Siagian dalam Agus, "Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa." (Suryono, 2010). Pembangunan tak ubahnya seperti nyawa masyarakat dalam meggapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Demi sebuah pembangunan, masyarakaat melakukan berbagai cara agar tidak tertinggal dengan modernitas. Pembangunan digunakan sebagai alat peningkatan kepercayaan diri untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa implikasi persyaratan pembangunan, antara lain 1) Kemampuan *(Capacity)*, 2) Kebersamaan *(Equity)*, 3) Kekuasaan atau Pemberdayaan *(Empowerment*), 4) Ketahanan atau Kemandirian (*Sustainability*), dan 5) Saling Ketergantungan *(Interdependency*) (Surono, 2010).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnyaa dianggap tidak baik, ataupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik dan bagai kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, pembangunan mempunyai pengaruh dan dampak yang cukupp besar dalam kehidupan masyarakat pesisir ke depannya, terutama dalam pembangunan kawasan pesisir di Kota Bontang.

Melalui IDM dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 81 Tahun 2015 adanya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ada beberapa evaluasi yang akan menjadi indikator penilaian yaitu: Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang Kemasyarakatan (Permendagri Nomor 81 tahun 2015). Kemajuan dan perkembangan wilayah desa adapun kategori yang bisa menjadi acuan penilaian. Nilai poin D di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang. Jika nilai 301 sampai dengan 450 maka dikategorikan desa berkembang, dan jikan nilai dibawah itu dengan nilai 300 dikategorikan desa kurang berkembang.

Namun untuk penilaian perkembangan kelurahan berbeda dengan nilai poin dari desa. Jika nilai

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

diatas sama dengan 351 dikategorikan kelurahan cepat berkembang, jika nilai hanya 201 sampai 305 dapat dikategorikan kelurahan berkembang. Sedangkan jika poin nilai itu dibawah 200 atau sama dengan 200 maka dapat dikategorikan kelurahan kurang berkembang. (Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pasal 18).

Indeks Desa Membangun dalam PERMENDAGRI penilaian kelurahan merupakan komposit dari tiga dimensi, yaitu Dimensi Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. (Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan pasal 6.

1. Dimensi Kemasyarakatan

Dimensi Sosial itu sendiri mempunyai beberapa aspek Partisipasi Masyarakat yang masih aktif, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Keluarga, adanya keamanan, Pendidikan yang lengkap, kesehatan pelayanan maupun sarana prasarana, perekonomian dan penanggulangan kemiskinan.

2. Dimensi Pemerintahan

Dimensi Pemerintahan yang mempunyai beberapa aspek indikator. Seperti keberagaman pelestarian adat dan budaya, kinerja yang baik dilakukan oleh aparatur negara, adanya inisiatif dan kreatifitas dalam pemberdayaan masyarakat, kelurahan memiliki akses teknologi informasi atau adanya *E-Government*.

3. Dimensi Kewilayahan

Dimensi Ekologi atau Lingkungan yang mempunyai beberapa variabel yaitu identitas wilayah tersebut, batas wilayah, inovasi perkembangan wilayah, potensi rawan bencana alam.

Dari beberapa indikator Indeks Desa Membangun tersebut, ketiga aspek dari bidang Pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Bidang pemerintahan memiliki 9 indikator dan 48 sub-indikatornya, sedangkan bidang kewilayahan memiliki 12 indikator dan 45 sub-indikator dan yang terkahir bidang kemasyarakatan 44 indikator dan 76 Sub-Indikator. Yang nanti menjadi syarat untuk menentukan penilaian perkembangan kelurahan menjadi status desa.

Penentuan cara menentukan tingkat perkembangan kelurahan dan desa. Mengjitung poin total dari subindikator masing-masing desa dan kelurahan kemudian rujuk pada nilai ideal yang di tentukan pada kolom 3 kategori di bawah ini:

Tabel 1.1
Klasifikasi Poin Desa

No	POIN	KATEGORI
1	≤ 300	Kurang Berkembang
2	301 – 450	Berkembang
3	≥ 451	Cepat Berkembang

Tabel 1.2
Klasifikasi Poin Kelurahan

No	POIN	KATEGORI
1	≤ 200	Kurang Berkembang
2	201 – 350	Berkembang
3	≥ 351	Cepat Berkembang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Metode kualitatif yaitu data-data yang berasal dari naskah

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

wawancara, observasi, dokumentasi pribadi dan dokumen resmi lainnya. lokasi penelitian di 3 tempat yaitu Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Lestari dan Kelurahan Loktuan, Kota Bontang Kalimantan Timur. Penelitian di tempat tersebut agar melihat pengembangan desa dan tipologi masyarakat pesisir.

Jenis data dalam penelitian adalah data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, buku ilmiah, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang penentuan respondennya menggunakan teknik *purposive*. Informan yang diwawancarai berjumlah 11 responden yaitu Sekur Kelurahan Tanjung Laut Indah, KASI Kelurahan Bontang Kuala, Lurah Guntung, KASUBAG Pembinaan Adm. Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah, Masyarakat Kelurahan Guntung, Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala dan pemilik UMKM di tiap kelurahan. Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi dan dokumentasi yang langsung dilakukan di Lapangan Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Gambaran Umum

Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalantrans Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar sehinggamenguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang denganwilayah lain di luar Kota Bontang. Meskipun wilayah Kota Bontang tidak begitu luas, hanya 49.757 Ha namun karena terletak di jalur khatulistiwa dengan wilayah laut yang begitu luas, menjadikan kota ini kaya akan potensi alam. Mulai dari minyak dan gas alam, hasil hutan, pertanian, dan juga laut. Didukung lokasi yang strategis, Kota Bontang dilalui oleh beberapa sungai yang berhulu di bagian Barat(Kabupaten Kutai) dan bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuh, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang aliran permukaannya membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Santan.

Kota Bontang mempunyai aksesibilitas darat dan laut yang baik. Aksesibilitas darat sangat baik karena terletak di jalur Trans Kalimantan, serta terletak di Selat Makassar dengan pantai yang berbentuk teluk yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), sehingga sangat cocok untuk pelabuhan.

1. Perkembangan Penduduk dan Tenaga Kerja

Keberadaan dua industri besar nasional masih menjadi daya tarik tenagakerja untuk hijrah ke Kota Bontang, ditambah lagi dengan perusahaan tambangyang lokasinya tak jauh dari Kota Bontang. Kedatangan tenaga kerja baru di Kota Bontang tentunya akan terus menambah populasi penduduk yang pada tahun 2008, 2009, 2010 berturut-turut adalah sebesar 133.512, 137.349, dan 143.683 jiwa.

Jumlah ini menjadikan Kota Bontang menjadi kota terpadat di KalimantanTimur setelah Balikpapan dan Kota Samarinda. Dari tabel 4.1. terlihat bahwa Kecamatan Bontang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 61.394 jiwa padahal jika

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

dilihat dari luas wilayah Kecamatan Bontang Utara bukan merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya jika dibandingkan dengan Kecamatan Bontang Selatan. Kepadatan penduduk selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 57.442 jiwa dan Kecamatan Bontang Barat 24.847 jiwa.

2. Perkembangan Perekonomian Kota Bontang

Perkembangan perekonomian yang cukup pesat dengan didukung oleh duaperusahaan penggerak perekonomian yaitu PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim Tbk. Kontribusi kedua perusahaan tersebut sangat mendominasi perkembanganekonomi di Kota Bontang. Dalam lima tahun terakhir dominasi sumbangannyarata-rata pertahun mencapai 88,01 persen dari total PDRB Kota Bontang. Konsekuensi besarnya kontribusi sub sektor tersebut berimplikasi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Bontang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Kelurahan Bontang Kuala

Kelurahan Bontang Kuala merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya serta luasan wilayah daratan yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lautnya, menjadikan wilayah kelurahan ini sebagai salah wilayah pemukiman berkembang di Kota Bontang, dan wilayah yang memiliki potensi sumber daya Kelautan yang cukup besar. Sehingga menetapkan salah satu wilayah pemukiman berkembang di Kota Bontang sebagai tipologi dikawasan Kelurahan Bontang Kuala. Kelurahan Bontang Kuala juga memiliki keragaman etnis yang terdapat di dalamnya cukup heterogen.

Kelurahan Bontang Kuala juga merupakan salah satu tujuan wisata bagi masyarakat Kota Bontang, wisatawan regional maupun wisatawan mancanegara, yang saat ini masih terbapat dari tamu – tamu dari Perusahaan yang ada di Kota Bontang. Kelurahan Bontang Kuala terbagi dalam 2 wilayah, yang terdiri dari Wilayah Pemukiman di atas laut dan Pemukiman di wilayah darat. Pemukiman yang terletak di atas Laut terdiri dari 10 Rukun tetangga, sementara pemukiman di wilayah darat terdiri dari 6 Rukun tetangga. Dengan penduduk sebanyak 3.937 jiwa dan luas wilayah sebesar 627 Ha.

Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kawasan pesisir Kota Bontang karena berbatasan langsung dengan Selat Makasar di Sebelah Timur. Kelurahan Bontang Kuala merupakan salah satu kelurahan yang berkembang di Kota Bontang karena memiliki didukung oleh sumber daya alam dan prasarana pendukung pembangunan yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja perkembangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan. Kelurahan Bontang kuala termasuk dalam kategori kelurahan yang cepat berkembang karena memiliki nilai yang terdapat pada rentangan poin 301-450. Pada tahun 2016, Kelurahan Bontang Kuala memiliki nilai 403 dengan kategori berkembang. Pada tahun 2017

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

kelurahan Bontang Kuala memiliki nilai 401 dengan kategori berkembang.

2. Tipologi Kelurahan Guntung

Kelurahan Guntung merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Dengan jumlah penduduk yang terus berkembang setiap tahunnya serta luasan wilayah daratan yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lautnya, menjadikan wilayah kelurahan ini sebagai salah wilayah pemukiman berkembang di Kota Bontang, dan menjadikan wilayah pemukiman berkembang sebagai tipologi dikawasan ini, serta wilayah yang memiliki potensi sumber daya Kelautan yang cukup besar. Sebagai salah satu wilayah pemukiman berkembang di Kota Bontang, kelurahan Guntung juga memiliki keragaman etnis yang terdapat di dalamnya cukup heterogen.

Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kawasan pesisir Kota Bontang karena berbatasan langsung dengan Selat Makasar di Sebelah Utara dan Timur. Kelurahan Guntung merupakan salah satu kelurahan yang berkembang di Kota Bontang karena memiliki didukung oleh sumber daya alam dan prasarana pendukung pembangunan yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja perkembangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan. Kelurahan Guntung termasuk dalam kategori kelurahan yang cepat berkembang karena memiliki nilai yang terdapat pada rentangan poin 301-450. Pada tahun 2016 kelurahan Guntung memiliki nilai 364 dengan kategori berkembang. Pada tahun 2017, Kelurahan Guntung memiliki nilai 361 dengan kategori berkembang.

3. Tipologi Kelurahan Tanjung Laut Indah

Kelurahan Tanjung Laut Indah merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah pemukiman yang berkembang di Kota Bontang menjadikan wilayah pemukiman sebagai tipologi dari kelurahan Tanjung Laut Indah, dan wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang cukup besar. Sebagai salah satu wilayah pemukiman berkembang di Kota Bontang, kelurahan Tanjung Laut Indah juga memiliki keragaman etnis yang terdapat di dalamnya cukup heterogen.

Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kawasan pesisir Kota Bontang karena berbatasan langsung dengan Selat Makasar di Sebelah Timur. Kelurahan Tanjung Laut Indah merupakan salah satu kelurahan yang berkembang di Kota Bontang karena memiliki didukung oleh sumber daya alam dan prasarana pendukung pembangunan yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja perkembangan desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan. Kelurahan Tanjung Laut Indah termasuk dalam kategori kelurahan yang cepat berkembang karena memiliki nilai yang terdapat pada rentangan poin 301-450. Pada tahun 2016 kelurahan Tanjung Laut Indah memiliki nilai 341 dengan kategori berkembang. Pada tahun 2017 kelurahan Tanjung Laut Indah memiliki nilai 361 dengan kategori berkembang.

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

Strategi Pengembangan Kelurahan di Kawasan Pesisir Kota Bontang

Pengelolaan kawasan pesisir sangat diperlukan saat ini untuk mengelola sumberdaya yang ada di kawasan pesisir secara maksimal. Karakteristik pesisir pada umunya meliputi terdapat keterkaitan ekologis yang erat antara wilayah pesisir dengan daratan dan lautan, memiliki produktivitas yang tinggi, sangat dinamis dan fluktuatif, terdapat lebih dari satu SDA dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dan terdiri dari dua kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda.

Wilayah pesisir merupakan ruang pertemuan antara daratan dan lautan, karenanya wilayah ini merupakan suatu wilayah yang unik secara geologis, ekologis, dan merupakan domain biologis yang sangat penting bagi banyak kehidupan di daratan dan di perairan, termasuk manusia. Wilayah pesisir juga unik dari segi ekonomi karena wilayah ini menyediakan ruang bagi aktivitas manusia yang menghasilkan manfaat ekonomi yang besar. Selain itu, Wilayah pesisir merupakan mosaik dari ekosistem dan sumberdaya yang sangat beragam, sehingga pesisir merupakan wilayah yang strategis bagi kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial serta pembangunan negara. Oleh karena itu maka strategi pengembangan wilayah pesisir sangat penting untuk diterapkan agar kawasan pesisir dapat berkembang dengan baik.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pesisir di Kota Bontang berkaitan dengan strategi pembangunan wilayah. Menurut Suryono, pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2010). Demi sebuah pembangunan, masyarakaat melakukan berbagai cara agar tidak tertinggal dengan moderniitas. Pembangunan digunakan sebagai alat peningkatan kepercayaan diri untuk mengendalikan masa depan, pembangunan mengandung beberapa implikasi persyaratan pembangunan, antara lain 1) Kemampuan *(Capacity)*, 2) Kebersamaan *(Equity)*, 3) Kekuasaan atau Pemberdayaan *(Empowerment)*, 4) Ketahanan atau Kemandirian *(Sustainability)*, dan 5) Saling Ketergantungan *(Interdependency)* (Suryono, 2010).

Adapun strategi pengembangan wilayah pada Kelurahan yang terletak di wilayah pesisir di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Optimalisasi Produksi Perikanan Melalui Budidaya Komoditas Perikanan**

Industrialisasi kelautan dan perikanan menurut Permen KP No.27/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan mencakup pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan serta pengembangan industri garam rakyat. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam. Sasaran yang akan dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

kelautan dan perikanan. Industrialisasi kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui strategi: (1) pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar; (2) penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan; (3) pengembangan konektivitas dan infrastruktur; (4) pengembangan usaha dan investasi; (5) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia; (6) pengendalian mutu dan keamanan produk; dan (7) penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Industrialisasi kelautan dan perikanan dapat terlaksana dengan meningkatkan populasi industri pengolahan hasil perikanan terutama UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, karena merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. Pengembangan UMKM tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga tanggung jawab UMKM itu sendiri, Lembaga Keuangan / Perbankan dan Swasta / Investor. Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha kepada UMKM.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan insentif fiskal dan moneter untuk menyelamatkan eksistensi serta membantu peningkatan daya saing sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan industri padat karya. Pemberdayaan UKM akan optimal apabila terdapat jaminan kesempatan seluas-luasnya bagi UKM untuk memasuki kegiatan ekonomi. Dukungan yang diperlukan terutama berupa bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar, teknologi, dan permodalan yang dikembangkan melalui bank maupun bukan bank.

Kemudian untuk isu ketahanan hasil perikanan, salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan menargetkan produksi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani menjadi 18,76 juta ton pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 7,90 juta ton (72%) dari produksi tahun 2014. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan dan hasil olahan perikanan adalah melalui peningkatan pemanfaatan bioteknologi perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya, produksi ikan, hingga pascapanen hasil perikanan.

Pemanfaatan bioteknologi ini misalnya adalah pemanfaatan mikroba yang telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen juga dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, dan tahan penyakit. Selain itu, bioteknologi juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pakan, benih unggul, dan kualitas air, dari proses persiapan produksi hingga pasca panen hasil perikanan. Pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu meningkatkan nilai produk serta produktivitas

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

produk perikanan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing produk perikanan.

Selanjutnya, agar perusahan atau industri pangan mampu bersaing secara global diperlukan kemampuan mewujudkan produk pangan yang memiliki sifat aman (tidak membahayakan), sehat dan bermanfaat bagi konsumen. Keamanan dan mutu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga keamanan produk hasil perikanan adalah dengan melakukan perbaikan fasilitas dan sarana UPI sesuai dengan standar, penetapan prosedur food safety pada UPI, penerapan rantai dingin, serta penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Standard Sanitation Operational Procedure* (SSOP), dan *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP).

2. Optimalisasi Peran TPI dan PPI Untuk Pemasaran Hasil Laut Masyarakat

Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian besarnya adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Bontang memiliki peran sebagai pelayan nelayan, yaitu melayani masyarakat nelayan guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nelayan dan sebagai sumber informasi nelayan di Bontang.

PPI di Bontang berusaha melayani nelayan dengan memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan di Bontang agar nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomiannya. PPI di Bontang juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan tentang masalah penangkapan ikan, alat tangkap, harga ikan dan lain sebagainya. Sehingga nelayan di Bontang bisa mendapatkan pengalaman atau informasi yang mereka butuhkan. Dengan mengoptimalisasikan peran TPI dan PPI untuk pemasaran hasil laut masyarakat, pemerintah telah melakukan usahanya dalam membuka akses pemasaran hasil panen serta membantu masyarakat dalam memasarkan hasil panennya.

PPI merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan yang merupakan tempat pendaratan hasil tangkapan fish landing oleh nelayan. Sehingga, untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan *(stakeholder),* sumber daya manusia yang berkompetensi, mutlak dipergunakan guna meningkatkan pelayanan terhadap segenap aktivitas di PPI. Oleh karena itu, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan, perlu dilakukan dengan intensif agar fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, guna meningkatkan pelayanan dan kinerja PPI dan TPI yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan. peran PPI dan TPI di masing-masing desa telah dioptimalisasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nelayan dan stakeholder.

3. Penguatan Sarana dan Prasarana Bagi Nelayan

Beberapa isu utama yang dihadapi dalam pengembangan pengolahan perikanan terkait dengan ketersediaaan sarana adalah (1) Tingginya tingkat kehilangan (losses) hingga sekitar 27,8% akibat kualitas

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

bahan baku yang kurang terjaga karena rendahnya pengetahuan nelayan, pembudidaya ikan, pemasar dan pengolah hasil perikanan, dan petugas TPI/PPI mengenai cara penanganan dan pengolahan yang baik (*good manufacturing practice*/GMP) serta karena terbatasnya sarana dan prasarana penangan ikan di atas kapal, TPI/PPI, distribusi dan unit pengolah ikan (UPI) skala mikro dan kecil, seperti peralatan *handling*, es, dan air bersih; (2) Jenis ragam produk dan pengembangan produk bernilai tambah (*value added products*) belum berkembang optimal dan belum popular. Meskipun kajian dan hasil penelitian pemanfaatannya sudah banyak tersedia, namun produksi secara masal masih belum dapat direalisasi karena ketersediaan sarana prasarana, mahalnya peralatan, kurangnya teknologi serta masalah kontinuitas suplai bahan baku; dan (3) terbatasnya SDM pengelola data perikanan tangkap dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan tangkap, sehingga pendataan perikanan masih dianggap kurang memadai.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia, seperti: kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Sehingga diperlukan penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi diantaranya melalui reklamasi yang terkendali.

Inpres No. 7/2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional, berisi instruksi langkah-langkah strategis percepatan industri perikanan nasional, melalui: (i) peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan; (ii) perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing; (iii) percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan WPP-NRI sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan; (iv) penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional; (v) percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan; (vi) percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional; dan (vii) penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi, dapat dilakukan melalui: (i)

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

penjaminan ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input, yang mencakup BBM, induk unggul, benih ikan berkualitas, obat-obatan, dan pakan bermutu berbasis bahan baku lokal; (ii) penguatan sistem dan jaringan penyediaan induk dan perbenihan, termasuk di daerah Timur Indonesia; (iii) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana penangkapan ikan; (iv) pemenuhan pasokan air minum dan energi (listrik) di pelabuhan perikanan; (v) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam dengan kerjasama lintas pelaku dan pemerintah daerah; (vi) pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra produksi perikanan budidaya; (vii) penyediaan sarana karamba jaring apung untuk akuakultur.

Agar perusahan atau industri pangan mampu bersaing secara global diperlukan kemampuan mewujudkan produk pangan yang memiliki sifat aman (tidak membahayakan), sehat dan bermanfaat bagi konsumen. Keamanan dan mutu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga keamanan produk hasil perikanan adalah dengan melakukan perbaikan fasilitas dan sarana UPI sesuai dengan standar, penetapan prosedur *food safety* pada UPI, penerapan rantai dingin, serta penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Standard Sanitation Operational Procedure* (SSOP), *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP).

Prasarana pelabuhan perikanan / pangkalan pendaratan ikan terdiri atas :

1) fasilitas dasar terdiri dari penahan gelombang, alur pelayaran, rambu-rambu navigasi, kolam pelabuhan, dermaga/yetty dan lahan untuk kawasan industri perikanan (dibangun dan dibiayai oleh pemerintah)
2) fasilitas fungsional, terdiri dari pabrik es, *coldstorage*, dok/galangan kapal, bengkel, tangki BBM, instalasi air bersih, instalasi listrik, gedung lelelangan ikan, balai pertemuan nelayan, radio komunikasi/SSB (pembangunan dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada Koperasi, BUMN atau swasta yang bermitra).
3) Fasilitas pendukung, terdiri dari kantor untuk adimistrator pelabuhan/PPI, kantor syahbandar, bea cukai, aparat keamanan, kantor managemen unit, perumahan karyawan, gudang, warung, MCK Umum, tempat beribadah dan lain-lain (dibangun dan dibiayai oleh pemerintah).

4) Penguatan Upaya Konservasi dan Rehabilitasi Ekologis Pesisir

Kegiatan penanaman meliputi pemancangan batas konfigurasi lapangan dan pengukuran, pembabadan batas tanaman. Penanaman sebaiknya setelah bibit tanaman mangrove memiliki daun 4 lembar daun, dan memakai jarak 1 x 2 meter atau 2 x 3 meter arah melintang terhadap air pasang-surut. Penanaman untuh bibit jenis Avicennia sp, dapat dilakukan dengan memindahkan sapling yang telah mencapai ketinggian 30-50 cm dengan hati-hati, dan diupayakan mencari lokasi yang memiliki substrat lumpur dan tergenang air.

Setelah program penanaman bibit mangrove selesai, maka kegiatan selanjutnya yang sangat penting adalah kegiatan pemeliharan. Kegiatan ini meliputi penyiangan gulma

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

pengganggu dan penyulaman dilakukan setiap bulan, terutama pada masa pertumbuhan jika ada yang mati. Kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman mangrove diupayakan sampai sekitar 2 tahun. Kemudian penjarangan dilakukan setelah tegakkan berumur 5-10 tahun, mengingat waktu tanam jarak antara tumbuhan satu dengan lainnya hanya 1 x 2 meter atau 2 x 3 meter.

Penurunan luas areal hutan mangrove di Indonesia dari tahun ke tahun tersebut adalah disebabkan oleh perilaku manusia yang mengkonversi lahan mangrove untuk berbagai kegiatan. Kegiatan pembangunan utama yang menyebabkan menurunnya luas areal hutan mangrove di lndonesia tersebut adalah eksploitasi hutan mangrove untuk areal pertambakan, pemukiman dan areal pertanian, serta pengambilan kayu untuk keperluan komersial.

Berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1967 mengenai Ketentuan Pokok Kehutanan, fungsi hutan termasuk hutan mangrove dibedakan atas hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata. Hutan Suaka Alam adalah hutan diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan sumberdaya hayati dan manfaat lainnya. Hutan ini terdiri dari hutan cagar alam dan hutan marga satwa. Kriteria kawasan cagar alam adalah kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya mempunysi kondisi alam yang masih asli dan belum terganggu oleh manusia. Sedangkan untuk kawasan marga satwa adalah kawasan yang merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu satwa yang perlu dikonservasi, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi dan merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu. Hutan Suaka Alam mangrove ini dicanangkan seluas 520.070 hektar.

Hutan produksi adalah hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan untuk pembangunan industri serta ekspor. Berdasarkan atas pertimbangan dari berbagai aspek, sebagian lahan hutan produksi dapat dikonversikan untuk keperluan pembangunan di luar bidang kehutanan. Hutan produksi ini meliputi hutan produksi terbatas yaitu diperkirakan seluas 508.490 hektar dan hutan produksi tetap yaitu seluas 847.970 hektar. Hutan produksi yang dapat dikonversi untuk berbagai macam kegiatan adalah seluas 799.460 hektar, dan areal untuk penggunaan lain adalah seluas 3.735.340 hektar.

Hutan lindung dimaksudkan sebagai hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta kesuburan tanah. Kawasan hutan mangrove sebagai hutan lindung yaitu arealnya di sepanjang pantai yang terletak sampai jarak 50 meter dari garis pantai surut terendah, dan sampai jarak 10 meter kanan kiri sungai, alur air atau jalan raya. Hutan mangrove ini mempunyai fungsi lindung antara lain untuk pembentukan lahan dari bahan yang terbawa sungai saat banjir, pelindung tanah dari bahaya erosi pantai, tempat pembiakan biota laut, sebagai habitat biota laut serta sebagai stabilator ekosistem perairan.

Hutan wisata merupakan bagian dari kawasan lindung dan bukan merupakan kawasan usaha, sehingga tujuan pengelolaannya tidak perlu diarahkan untuk mendapatkan

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

keuntungan ekonomi saja, namun lebih ditujukan sebagai perlindungan dan sebagai salah satu keperluan hidup manusia. Hutan wisata ini berfungsi sebagai hutan yang dapat memenuhi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Dalam fungsi ini terdapat unsur komersial, sehingga dalam pengelolaannya termasuk kegiatan bidang pengusahaan.

Seirama dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dewasa ini, telah menempatkan kawasan hutan mangrove dieksploitasi menjadi sasaran yang potensial untuk kegiatan pertambakan, pertanian dan pemukiman. Pemanfaatan wilayah pesisir yang semakin meningkat tersebut selain memberikan dampak positif melalui peningkatan taraf hidup dan lapangan kerja kepada masyarakat pantai, namun juga mempunyai akibat yang negatif terhadap ekosistem mangrove, jika pemanfaatannya tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali. Oleh karena itu, kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang telah kritis kondisinya perlu dilakukan, untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi perlindungan, pelestarian dan fungsi produksinya.

Upaya untuk merehabilitasi lahan hutan mangrove yang telah kritis adalah dengan cara melakukan penghijauan dengan memerlukan teknik yang spesifik. Disamping penguasaan teknik penanaman, perlu juga dipelajari formasi jenis tumbuhan yang membentuk atau jenis penyususun hutan mangrove pada lokasi yang akan dilakukan penanaman Umumnya hutan terdiri dari tumbuhan penyusun utama, antara lain Avicennia sp. Rhizophora sp. Sonneratia sp. atau Bruguiera sp.

Pemulihan kualitas lingkungan, dilakukan melalui: (a) Penilaian kawasan mangrove, (b) Peningkatan kualitas habitat, (c) Peningkatan kualitas kawasan hijau, dan (d) Pemberdayaan masyarakat terhadap kawasan mangrove. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam upaya pelaksanaan penghijauan lahan mangrove yang telah rusak adalah dengan melakukan pengadaan bibit, seleksi bibit. persemaian dan media semai, pengangkutan bibit, penanaman dan pemeliharan.

Pengadaaan bibit untuk penghijauan ini sebaiknya diambil dari pohon induk yang sehat dan sudah berumur lebih 10 tahun ke atas. Pengambilan bibit diupayakan diambil dekat dengan lokasi yang akan dilakukan penanaman. Pengambilan bibit harus diseleksi, yaitu memilih bibit yang sehat, ukuran antara 45-75 cm, lurus, kuat dan jika diambil dari biji yang sudah tumbuh harus memilih bibit yang memiliki pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Pengambilan bibit tersebut sebaiknya dilakukan pada bulan September untuk jenis Rhizophora sp. atau bulan November - Desember untuk jenis Avicennia sp. karena pada bulan tersebut bibit jenis mangrove sudah cukup layak tanam. Bibit tersebut kemudian dikumpulkan dan ditampung dalam polibag (plastik) yang telah diisi tanah Lumpur, dan diletakkan pada tempat yang ternaung agar bibit tetap lembab dan tidak langsung terkena sinar matahari, dan waktu pertumbuhan di persemaian sekitar 2-4 bulan. Selain ditampung pada lokasi yang ternaung. lokasi penampungan bibit harus terlindung dari pukulan ombak.

Bahwa saat ini hanyak areal hutan mangrove yang dikonversi untuk

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

berbagai kegiatan pembangunan, maka perlindungan di kawasan pesisir yang dianggap rawan terhadap kerusakan adalah suatu langkah yang sangat urgen dan tepat untuk dilakukan. Upaya perlindungan, pengawetan dan pelestarian alam dalanm bentuk penyisihan areal sebagai kawasan suaka alam pada prinsipnya adalah untuk melestarikan habitat dengan tipe ekosistemnya, melindungi flora dan fauna yang terancam punah dan mengelola areal mangrove secara berkesinambungan. Perlindungan flora dan fauna dan ekosistem di Indonesia pada dasarnya telah tercakup dalam Undangundang No. 5 Tahun 1990, mengenai konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya.

Berbagai peraturan pemerintah yung berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Indonesia telah digulirkan dengan berbagai macam kebijakannya, namun yang terpenting diantaranya adalah:

1) Kebijakan nasional dibidang pengelolaan keanekaragaman hayati laut.
2) Strategi nasional di bidang pengelolaan mangrove.
3) Kebijakan nasional di bidang pembangunan pedesaan.
4) Strategi nasional di bidang pengelolaan jalur hijau pesisir.

Sedangkan strategi pokok konservasi untuk mendasari pengelolaan hutan di kawasan pesisir, adalah sebagai berikut:

1) Perlindunga proses ekologis dan penyangga kehidupan kawasan.
2) Pengawetan keragaman sumber daya plasma nuflah.
3) Pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem.
4) Tata guna dan tata ruang kawasan hutan pantai.

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan tersebut memberikan suatu batasan yang sangat jelas, namun dalam pelaksanaan penghijauan harus menyertakan masyarakat setempat. Untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove tersebut, maka seyogyanya instansi pemerintah setempat dan LSM dilibatkan untuk mengkoordinasi program, memonitor pelaksanaan program serta bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan tentang arti penting dari program yang dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan kondisi ekologinya Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang memiliki terumbu karang yang cukup luas yaitu sekitar 8.744 ha. Hal ini merupakan kekayaan sangat mendukung pembangunan wilayah pesisirna. Maka kondisi Kelurahan di Pesisir Kota Bontang adalah sebagai berikut:
   a. Kelurahan Bontang Kuala: bahwa sampai dengan tahun 2018 terdapat 146 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk kategori keluarga miskin dengan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 2.767 penduduk atau lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan jumlah 2.739 dan mayoritas agama penduduk Kelurahan Bontang Kuala yaitu memeluk agama Islam.
   b. Kelurahan Guntung: sampai dengan tahun 2018 terdapat 168 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk kategori keluarga miskin, dengan

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

jumlah penduduk sebanyak 8.274 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.328 jiwa dan perempuan 3.977 jiwa dan luas wilayah sebesar 849 Ha. Minimnya perguruan tinggi membuat hanya sedikit penduduk yang mampu menempuh bangku kuliah. Kondisi ini sebagai dampak dari belum terpenuhinya fasilitas pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas dan merata dengan skala pelayanannya. Sedangkan mayoritas agama penduduk kelurahan Guntung yaitu memeluk agama Islam.

c. Kelurahan Tanjung Laut Indah: sampai dengan tahun 2018 terdapat 485 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk kategori keluarga miskin dengan jumlah penduduk sebanyak 14.820 jiwa yang terdiri dari laki-laki 7.685 jiwa dan perempuan 7.135 jiwa dan luas wilayah sebesar 306 Ha. Penduduk Kelurahan Tanjung Laut Indah lebih mengutamakan pendidikan formal daripada pendidikan non-gfrmal. Mayoritas agama penduduk kelurahan Tanjung Laut Indah yaitu memeluk agama Islam

2. Tipologi dan pengembangan kelurahan-kelurahan pesisir Kota Bontang dari masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:
   a. Kelurahan Bontang Kuala: penilaian bidang pemerintahan Kelurahan Bontang Kuala pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan sebanyak 2 poin, dan penilaian bidang kewilayahan dan kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala pada tahun 2016 hingga 2017 tidak mengalami perubahan apapun.
   b. Kelurahan Guntung: penilaian bidang pemerintahan Kelurahan Guntung pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan sebanyak 1 poin, penilaian bidang kewilayahan Kelurahan Guntung pada tahun 2016 hingga 2017 tidak mengalami perubahan apapun dan penilaian bidang kemasayarakatan Kelurahan Guntung pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan sebanyak 2 poin. Penurunaan yang dialami oleh Tipologi dan pengembangan kelurahan-kelurahan pesisir Kota Bontang dari masing-masing kelurahan diatas yaitu dari kelurahan Bontang dan Kelurahan Guntung diatas adalah dikarenakan kualitas lingkungan perikanan budidaya juga ikut mempengaruhi pengembangan perikanan budidaya, serta pengembangan pengolahan perikanan terkait dengan ketersediaaan sarana adalah (1) Tingginya tingkat kehilangan *(losses)* hingga sekitar 27,8% akibat kualitas bahan baku yang kurang terjaga karena rendahnya pengetahuan nelayan, pembudidaya ikan, pemasar dan pengolah hasil perikanan, dan petugas TPI/PPI mengenai cara penanganan dan pengolahan yang baik (*good*

Journal of Governance Innovation
Volume 2, Number 1, Maret 2020
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.417

manufacturing practice/GMP) serta karena terbatasnya sarana dan prasarana penangan ikan di atas kapal, TPI/PPI, distribusi dan unit pengolah ikan (UPI) skala mikro dan kecil, seperti peralatan handling, es, dan air bersih; (2) Jenis ragam produk dan pengembangan produk bernilai tambah (*value added products*) belum berkembang optimal dan belum popular.

c. Kelurahan Tanjung Laut Indah: penilaian bidang pemerintahan Kelurahan Tanjung Laut Indah pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan sebanyak 13 poin, penilaian bidang kewilayahan Kelurahan Tanjung Laut Indah pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan sebanyak 2 poin dan penilaian bidang kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan sebanyak 4 poin

3. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan kelurahan di kawasan pesisir Kota Bontang meliputi 4 stretagi, diantaranya adalah: 1) optimalisasi produksi perikanan melalui budidaya komoditas perikanan,; 2) optimalisasi peran TPI dan PPI untuk pemasaran hasil laut masyarakat; 3) penguatan sarana dan prasarana bagi nelayan; dan 4) penguatan upaya konservasi dan rehabilitasi ekologis pesisir. Keempat strategi tersebut telah dilakukan oleh masing-masing desa, yaitu Bontang Kuala, Guntur dan Tanjung Laut Indah dengan sangat baik. Berkaitan dengan strategi-strategi yang dilakukan untuk pengembangan kelurahan di kawasan pesisir Kota Bontang, strategi tersebut juga memiliki kekurangan.

Kekurangan dari strategi tersebut yaitu sebagai wilayah dengan mayoritas wilayahnya terletak di wilayah pesisir, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Bontang akan sangat bergantung dengan pengelolahan dan pembangunan wilayah pesisir. Akan tetapi, pembangunan Kota Bontang akan terkendala dengan permasalahan urusan kewenangan di wilayah laut. Pembangunan wilayah pesisir di Kota Bontang dihadapkan pada permasalahan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagaimana terjadi di seluruh kabupaten/kota pesisir, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diberikan kewenangan apa pun terkait pengelolaan kelautan.

Akibatnya, pengelolaan pesisir yang tidak terintegrasi ini berdampak pada keberlanjutan wilayah pesisir Kota Bontang yang menjadi visi pembangunannya. Padahal, di wilayah tersebut terdapat berbagai aktivitas seperti perikanan budidaya, industri (gas dan petrokimia) dengan pelabuhan khususnya, pelabuhan khusus batu bara, pelabuhan umum dan perikanan, permukiman dan pariwisata, pertambangan minyak lepas pantai, budidaya perikanan dan perikanan tangkap, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain kejelasan wewenang, diperlukan

strategi pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berimbang antara aspek sosial ekonomi dan lingkungan melalui pengelolaan pesisir Kota Bontang yang terpadu dan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pemerintah
   Sebagai kawasan pesisir, diharapkan Kota Bontang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama memperhatikan bagaimana produksi, pengolahan, dan pemasaran untuk memenuhi standar agar proses bongkar ikan dan pengolahan hasil panen dapat dilakukan dengan lebih efisien;
2. Bagi pihak yang berada di area TPI dan PPI, diharapkan dapat terpenuhi baik dari sarana maupun prasarananya agar dapat memperoleh hasil panen dan produksi ikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Bandur 2014. Metode Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan 10 e-Jakarta. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Creswll, J., W., 2012, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; cetakan ke-2. Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.

Darsidi, A. 1984. Pengelolaan Hutan Mangrove. Prosiding Seminar II Ekosistem Hutan mangrove. Panitia Nasional Program MAB Indonesia-LIPI.

Giesen, W. 1993. Indonesian Mangrove: An Update on Remaining Area and Management isues. Presented on International Seminar on Coastal Zone Management of Sinai Island Ecosystem. Ambon, 7-10 April 1993

Kartono. 1980. Pengantar Metodologi Research Sosial. Penerbit ALUMNI. Bandung.

KKP. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.

KKP. 2011. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

LPPD Kota Bontang. 2016

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Jonny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications Inc. California.

Munasinghe M. 2002. Analysing the nexus of sustainable and climate change: an overview. OECD. France.

Nontji, A. 2002. Laut Nusantara. PT. Djambatan. Jakarta

Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Pemendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Desa

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV Alfabeta.

Sugiyono. 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 23, Alfabeta, Bandung.

Suprih, Bambang, Wisadirana, Darsono. 2008. Sosiologi

Pedesaaan dan Perkotaan. Agritek YPN Malang kerjasama dengan CV SOFA Mandiri. Malang.

Suryono, Agus. 2010. Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. UBPress. Malang

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

WCED. The World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future (Document A/42/427). New York.